



Judul : Prolegnas : KY Desak DPR Tuntaskan RUU Jabatan Hakim
Tanggal : Senin, 28 September 2015
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 5

PROLEGNAS

KY Desak DPR Tuntaskan RUU Jabatan Hakim

JAKARTA (Suara Karya): Komisi Yudisial (KY) mendesak DPR agar segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Jabatan Hakim. Untuk itu, KY saat ini gencar melakukan sosialisasi RUU tersebut melalui seminar-seminar di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dengan tujuan masyarakat paham akan pentingnya perlindungan terhadap hakim.

Menurut Ketua KY, Suparman Marzuki, hakim adalah salah satu profesi yang tidak memiliki undang-undang khusus.

"Profesi advokat sudah ada UU-nya, insinyur juga sudah. Sementara hakim belum. Sehingga RUU

Jabatan Hakim sangat penting segera disahkan menjadi UU," ujar Suparman Marzuki, seperti tertuang dalam makalahnya yang disampaikan pada seminar Uji Publik RUU Jabatan Hakim, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sabtu (26/9).

Sebagaimana diketahui, RUU itu merupakan inisiatif DPR yang sudah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR tahun ini.

"Mudah-mudahan bisa lebih cepat diselesaikan. Karena, ini merupakan satu-satunya profesi wakil Tuhan yang tidak memiliki UU padahal ini penting sekali.

Menurut dia, perlindungan terhadap hakim, tidak

saja dilakukan saat menjalankan tugasnya di pengadilan, tapi juga dalam kehidupan sehari-harinya di luar tugas. Tidak pula hanya terhadap hakimnya, perlindungan juga perlu dilakukan terhadap keluarganya.

"Sayangnya yang terjadi, perlindungan hakim sangat lemah. Padahal, profesi hakim sangat berat tuntutannya," ujar Suparman.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faisal mengatakan, upaya untuk mendapatkan hakim yang baik dan berkualitas, perlu perhatian khusus berupa keberpihakan negara terhadap hakim.

"Negara harus mampu

menjamin independensi dan profesionalitas hakim agar masyarakat pencari keadilan selalu bertemu hakim yang memutuskan dengan tuntunan Illahi," ujarnya.

Sebab, katanya, mengemban tugas sebagai 'wakil Tuhan' di dunia ini, bukanlah perkara mudah. Negara, harus mendapatkan masukan calon hakim yang berkualitas dan profesional dengan parameter proses rekrutmen hakim, kesejahteraan hakim, dan pandangan publik terhadap hakim.

"Sayangnya, proses rekrutmen hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung, sering terjadi silang sengkabut," ujarnya. **(gan)**